



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUPINUS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 143373

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 957.255.000

1. Tanah Seluas 7698 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 346.410.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/54 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 52.200.000
3. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 8.645.000
5. Bangunan Seluas 112 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 115.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 38.250.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 189.686.902

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.300.191.902



III. HUTANG

Rp.

83.855.100

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.216.336.802

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.